

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan referensi untuk penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu tersebut antara lain :

**Tabel 2.1**

**Penelitian-Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Koperasi Bobato Unit Sofifi) Togubu J. (2017)	Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit	Deskriptif Kualitatif	Keefektifan pengendalian internal dengan penerapan prinsip 5C dan 7P, yang lebih menekankan pada <i>Character, Collateral, Prospect, Payment</i> dan <i>Personality</i> . Biasanya kegagalan kredit yang terjadi itu karena kelalaian pihak koperasi dalam menganalisa kredit yang akan disalurkan. Untuk mengatasinya dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran, penundaan pembayaran bunga sampai penurunan suku bunga.
2	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Makmur Surakarta) , Kristanto C. (2018)	Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit	Deskriptif Kualitatif	Ada pengaruh yang signifikan pada sistem informasi akuntansi atas pemberian kredit terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta. Hal ini menandakan bahwa sistem informasi akuntansi atas pemberian kredit yang dilakukan dengan baik, maka

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dapat meningkatkan kinerja karyawan. Ada pengaruh yang signifikan atas efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.
3	Analisis Sistem Pemberian dan Penagihan Kredit untuk Mencegah Kredit Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Guru / Pegawai SEJAHTERA Perguruan Taman Siswa Cabang Pematang Siantar. Hidayati Nurul S. (2017)	Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit	Deskriptif Kualitatif	Penerapan sistem akuntansi pemberian dan penagihan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematang Siantar cukup memadai dikarenakan adanya penggunaan dokumen dan catatan akuntansi.
4	Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Arta Makmur Blitar) , Masrunik E. (2017)	Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit	Deskriptif Kualitatif	Koperasi Simpan Pijam Arta Makmur dalam pemberian kredit sudah melaksanakan sistem akuntansi yang tepat, namun masih ada salah satu fungsi yang merangkap tugas kerja, yaitu fungsi marketing. Dimana fungsi marketing selain mencari nasabah juga bertugas untuk melaksanakan survey. Sehingga ke obyektifan dari hasil survey ini masih diragukan. Selain itu survey tidak dilaksanakan dengan tepat.
5	Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Kredit Macet bank Perkreditan Rakyat BPR Kota Jambi. Dwi Arum R. (2020)	Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit	Studi Deskriptif Kuantitatif	Pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern terhadap kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Jambi. Kedua, melihat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Jambi.

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Evaluasi Pengendalian Internal terhadap Kredit Diragukan Pada PT. Bank Sulutgo di Minahasa Induk. Marvini Rini Rotti (2017)	Pengendalian Internal terhadap Kredit Diragukan	Kualitatif dengan Studi Kasus.	Secara keseluruhan pengendalian internal pada PT. Bank SulutGo di Minahasa Induk berjalan cukup baik dan sudah sesuai dengan konsep pengendalian internal menurut COSO, pihak manajemen bank telah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal menurut COSO. Sistem dan prosedur yang memadai yang dimiliki oleh bank serta ditunjang dengan karyawan-karyawan yang berkompeten membuat tingkat kesalahan yang signifikan atas pengendalian kredit dapat diatasi dengan cepat.
7	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang KCU Kalimalang , Winta (2021)	Sistem Pengendalian Internal dan Prosedur Pemberian Kredit	Deskriptif Kuantitatif	Implementasi prosedur pemberian kredit telah sesuai dengan standar pemberian kredit. Implementasi sistem pengendalian internal pada pemberian kredit pada PT Bank Central Asia Tbk KCU Kalimalang telah memenuhi standar pengendalian internal <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i> (COSO), namun masih terdapat kelemahan, yakni terdapat pada komponen aktivitas pengendalian yaitu <i>account officer</i> merangkap beberapa fungsi mulai dari pemasaran, analisa kredit hingga pemantauan
8	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam Meminimalkan Risiko Kredit Macet. Studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Annisa, Farida Nikmatul Laila (2018)	Pengendalian Internal dalam Meminimalkan Risiko Kredit Macet	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengendalian intern yang ada telah memenuhi lima komponen sistem pengendalian yang baik. Hal ini berdampak pada prosentase tingkat kredit macet yang mengalami penurunan. Wujud dari keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian intern kredit ini merupakan hasil dari

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait.
9	Kecurangan Akun yang dapat Diterima : Peran Sistem Pengendalian Internal. Agustina Felisia Willeam (2020)	Piutang Dagang	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengendalian internal dapat dimanfaatkan oleh personal tertentu untuk kepentingan pribadinya dengan memanfaatkan kelemahan. Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal dan penyimpangan dapat segera ditangani.
10	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Risiko Kredit Di Antara Bank-Bank Spanyol Yang Terdaftar, Ellis Kofi Akwaa-Sekyi (2017)	Pengendalian Internal atas Risiko Kredit	Uji Hipotesis tentang Hubungan	Sistem pengendalian internal sudah ada tetapi efektivitasnya tidak dapat dijamin. Hal ini menyebabkan bank-bank yang terdaftar di Spanyol menghadapi situasi default yang serius. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit terutama lingkungan pengendalian, manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan pemantauan.
11	<i>Internal Controls in the Sales Cycle to Minimize Risks (Case Study at PT XYZ), Fitriyeni Oktavia (2018)</i>	<i>Internal Controls in the Sales Cycle</i>	<i>Description</i>	<i>A risk analysis design using risk calculations. This research is expected to enable the firm to take decisive action to face its significant risks</i>

Persamaan penelitian Togubu J. (2017), Kristanto C. (2018), Nurul S. (2017), Masrunik E. (2017), Arum R. (2020), Rotti (2017), Winta (2021), Laila (2018), Willeam (2020), Sekyi (2017) dan Oktavia (2018) adalah sama-sama meneliti mengenai "Sistem Pengendalian Intern pada Dunia Perkreditan" dan yang menjadikan perbedaan dari penelitian ini adalah obyek yang diteliti juga pada tahun penelitian ini dilaksanakan.

## 2.2

### Landasan Teori

#### 2.2.1 Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata Co dan Operation yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Sedangkan menurut Sonny Sumarsono dalam bukunya yaitu Manajemen Koperasi : Teori dan Praktik : “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan keluar - masuk sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan setiap anggota.”

Definisi koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan keluar - masuk sebagai anggota, dan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan rancangan usahanya, serta bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan setiap anggota.

##### 2. Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bab II pasal 3 menyatakan bahwa: “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota (pada khususnya) dan masyarakat (pada umumnya) serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Perihal fungsi dan peran koperasi, Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 menyatakan fungsi dan peran koperasi adalah :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi / kemampuan perekonomian anggota (pada khususnya) dan masyarakat (pada umumnya) guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial.
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun prinsip koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Bab II pasal 5 menyatakan bahwa :

- a) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
  - Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - Pengelolaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - Kemandirian.
- b) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut :
  - a) Pendidikan perkoperasian.
  - b) Kerja sama antar koperasi.

### **2.2.2 Pengendalian Intern**

#### **1. Pengertian Pengendalian Intern**

Pengendalian intern merupakan salah satu fungsi manajemen dalam operasionalnya, yaitu tindakan pengaturan, pengarahan, pelaksanaan pekerjaan dengan maksud tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengendalian intern digunakan baik dalam badan usaha yang berskala kecil yang pengelolaan

informasinya secara manual maupun badan usaha yang berskala besar yang pengelolaan informasinya dengan sistem komputerisasi.

Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi (2009 : 180) adalah suatu proses yang dijadikan oleh Dewan Komisaris Manajemen, dan personal lainyang didesain guna memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian 3 (tiga) golongan tujuan sebagai berikut :

1. Keandalan informasi keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisien operasional.

Menurut Mulyadi (2009 : 193) meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Jusup (2009 : 252) pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang guna mendapat keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kesesuaian dengan undang-undang, dan
- c. Peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.



Sedangkan Mulyadi (2009 : 165) menyebutkan bahwa “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen”.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pengurus dan staf pemeriksa intern.

## **2. Pentingnya Pengendalian Intern**

Pentingnya pengendalian intern bagi perkoperasian dipengaruhi oleh struktur pengendalian intern pada koperasi yaitu meliputi :

1. Luas dan ukuran kesatuan usaha yang menjadi bagian kompleks dan meluas sehingga manajemen harus mempercayai berbagai macam laporan dan analisis-analisisnya yang banyak jumlahnya.
2. Pengawasan dan penelitian yang melihat pada sistem pengendalian intern yang baik mampu melindungi terhadap kelemahan manusia dan mengurangi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan yang akan terjadi.

3. Tidak praktis apabila akuntan untuk memeriksa secara keseluruhan dengan keterlibatan uang tanpa mempercayai sistem pengendalian intern (Hartadi 1990 : 2)

Bagi koperasi, sistem pengendalian intern dapat digunakan lebih efektif untuk mencegah penggelapan atau penyimpangan. Dengan kata lain, memberikan kepastian bahwa penggelapan laporan keuangan dapat tercegah atau “subyek deteksi awal”.

### **3. Elemen Pengendalian Intern**

Elemen-elemen yang harus diterapkan dalam pengendalian intern agar dapat efektif dengan baik adalah sebagai berikut :

- Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi berkontribusi pada lingkungan pengendalian internal yang baik. Hal ini dikarenakan adanya kerangka yang menyeluruh untuk perencanaan, koordinasi dan pengendalian operasi.
- Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aktiva, utang, pendapatan dan biaya.
- Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit koperasi dan pengurus yang mutunya sesuai dengan unit produksi.

### **4. Tujuan Pengendalian Intern**

Dengan semakin berkembangnya suatu koperasi adalah bentuk kemampuan ketua koperasi tersebut, guna mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam koperasi semakin kecil. Untuk melaksanakan pengawasan secara efektif dilakukan pengendalian intern yang dilaksanakan untuk menjamin pengendalian yang cukup atas operasi. Alasan koperasi menerapkan sistem pengendalian intern adalah untuk membantu ketua dan pengurus lainnya mencapai tujuan perkoperasian secara efektif dan efisien.

Tujuan sistem pengendalian intern yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga kekayaan koperasi, aktiva atau kekayaan koperasi dapat dicuri atau disalahgunakan atau dirusak jika tidak dilindungi oleh pengendalian intern yang memadai.
- b. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi, manajemen dalam koperasi harus memiliki data akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Data tersebut akan digunakan untuk pengambilan keputusan yang penting. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan atau menguji kecermatan seberapa jauh data akuntansi bisa diyakini dengan cara mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan pada saat yang tepat.

Menurut Mulyadi (2009 : 180) tujuan pengendalian intern dalam akuntansi dapat digolongkan sebagai berikut :

- Menjaga kekayaan koperasi, yang artinya adalah :
  - a. Penggunaan kekayaan koperasi hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan.
  - b. Pertanggungjawaban kekayaan koperasi yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.
- Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang artinya adalah :
  - a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.
  - b. Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi.

### **5. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Mulyadi (2001 : 164) unsur pokok sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, piutang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya.

### **6. Prinsip-Prinsip Sistem Pengendalian Intern**

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi 6 (enam) prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi (Hartadi, 2010 : 130) :

1) Pemisahan fungsi

Tujuan utama pemisahan fungsi adalah guna menghindari dan mengawasi adanya kekeliruan atau ketidakberesan.

2) Prosedur pemberian kewenangan

Tujuan prosedur pemberian kewenangan adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh yang berwenang.

3) Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang layak, penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

4) Prosedur catatan akuntansi

Tujuan adanya prosedur catatan akuntansi adalah agar dapat disiapkan catatan-catatan akuntansi yang sistematis secara tepat dan akurat, sehingga data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

5) Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

6) Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.

### 2.2.3 *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*

COSO menyebutkan sistem pengendalian yang baik harus memenuhi lima komponen pengendalian internal yang saling terkait (Romney and Steinbart, 2010), yaitu :

a. Lingkungan pengendalian merupakan hal dasar bagi komponen COSO yang lain.

Manajemen harus paham pentingnya akuntabilitas *control*, dan memberikan dukungan terhadap *control* manajemen, dan menyampaikannya kepada seluruh karyawan. Faktor-faktor lingkungan pengendalian terdiri dari :

- a) Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika
- b) Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi.
- c) Struktur organisasi

- Komite Audit Dewan Komisaris.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal koperasi, proses pelaporan keuangannya dan kepatuhannya terhadap hukum, peraturan dan standar yang terkait

- Metode memberikan otoritas dan tanggung jawab melalui

deskripsi pekerjaan secara formal, pelatihan pegawai, dan rencana operasional, jadwal dan anggaran.

- Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia
- Pengaruh-pengaruh eksternal

b. Penilaian risiko merupakan proses pengidentifikasian dan analisa resiko yang berhubungan dengan pencapaian tujuan manajemen serta menentukan cara bagaimana resiko tersebut ditangani.

c. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat guna memastikan terlaksananya kebijakan manajemen.

Aktivitas pengendalian menurut Romney dan Steinbart, (2010) :

- Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Otorisasi sering kali didokumentasikan sebagai penandatanganan, pemberian tanda paraf, atau memasukkan kode otorisasi atas dokumen atau catatan transaksi. Otorisasi yang diberikan pihak manajemen pada saat aktivitas atau transaksi tertentu disebut otorisasi khusus. Sedangkan otorisasi umum adalah otorisasi yang diberikan pihak manajemen pada pegawai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus.
- Pemisahan tugas untuk mencegah para pengurus memalsukan catatan dengan tujuan menyembunyikan pencurian asset yang dipercayakan pada mereka. Pemisahan tugas yang efektif ketika fungsi-fungsi ini dipisahkan:

1. Otorisasi – menyetujui transaksi dan keputusan

2. Pencatatan – mempersiapkan dokumen sumber; memelihara catatan jurnal, buku besar dan *file* lainnya; mempersiapkan rekonsiliasi; serta mempersiapkan laporankinerja.
  3. Penyimpanan–menangani kas, memelihara tempat persediaan penyimpanan kas.
    - = Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
    - = Penjagaan asset dan pencatatan yang memadai
    - = Pemeriksaan independen atas kinerja. Sub-bagian di dalamnya adalah rekonsiliasi dua rangkaian catatan yang dipelihara secara terpisah, perbandingan jumlah aktual dengan yang dicatat, pembukuan berpasangan, jumlah total pengendalian, peninjauan independen.
- d. Informasi dan komunikasi. Komponen ini menjelaskan tentang kebutuhan terhadap pemerolehan informasi eksternal dan internal, potensi strategis dan sistem yang terintegras, dan kebutuhan terhadap kualitas data.
- e. Berhubungan dengan sasaran
1. Akurat dan terinci
  2. Mudah dipahami/digunakan
- f. Pengawasan (monitoring). Proses yang menilai kualitas kinerja sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu, diterapkan melalui kegiatan monitoring dan melakukan evaluasi secara terpisah.



Jika semua kebijakan serta prosedur yang ditetapkan pada koperasi dan menjalankan struktur organisasi serta uraian tugas telah sesuai dilengkapi oleh aktivitas pengendalian berdasarkan COSO, maka operasionalnya pun dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Tidak hanya itu, aktivitas pengendalian tersebut dapat mengurangi adanya risiko kecurangan yang bisa saja terjadi.

#### **2.2.4 Hubungan Pengendalian Intern dengan Kredit Macet**

Perusahaan menyusun sistem pengendalian internal dalam rangka untuk membantu dalam pencapaian tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijadikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus koperasi menjaga aset koperasi, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Banyak koperasi yang menyediakan pinjaman modal usaha. Dalam hal ini pengendalian intern dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya kemacetan kredit. Dengan adanya pengendalian intern diharapkan bank dapat menjamin proses pemberian kredit yang baik, yang diperlukan dalam upaya pencegahan kredit macet yang besar dikemudian hari yang dapat mengganggu stabilitas keuangan suatu koperasi.

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

